

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI SMA DAN SMK MENYONGSONG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Sugiharsono, Barkah Lestari, dan Endra Murti Sagoro

FE Universitas Negeri Yogyakarta

email: sugiharsono@gmail.com

Abstrak

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan kesiapan guru serta persepsi kepala sekolah serta kesiapan dan kendala yang dihadapi sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMA dan SMK dilihat dari akreditasi sekolah. Subjek penelitian melibatkan 16 sekolah SMA dan SMK yang ada di DIY. Instrumen yang digunakan adalah tes, angket, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data secara statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru dan kepala SMA dan SMK; kesiapan guru dilihat dari akreditasi, kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan, dan sarana/prasarana terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan tergolong sedang dengan rincian yang akreditasi sekolahnya A lebih tinggi dibandingkan dengan yang berakreditasi B serta yang berasal dari SMK lebih tinggi daripada dari SMA; kendala utama yang dihadapi guru di SMA adalah kurangnya kemampuan mengintegrasikan kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran (83,33%) dan adanya keterbatasan waktu (83,33%), sedangkan kendala utama yang dihadapi guru SMK adalah belum adanya dukungan dana dari sekolah (66,66%).

Kata kunci: pendidikan kewirausahaan, akreditasi sekolah, kurikulum 2013

DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP EDUCATION MODEL IN EDUCATIONAL UNIT OF SENIOR HIGH SCHOOLS AND VOCATIONAL SCHOOLS TO COMMEMORATE IMPLEMENTATION OF CURRICULUM 2013

Abstract

The study was aimed at finding out teachers' perception and readiness, principals' perception, and the barriers in implementing the entrepreneurship education program in senior high schools and vocational schools seen from their accreditations. The subjects of the study were 16 senior high schools and vocational schools in the special province of Yogyakarta. The research instruments were tests, questionnaires, observation, and documentation. Data were analyzed using descriptive statistics. Findings show that teachers' readiness and perception and principals' perception, skills in integrating entrepreneurship values, and facilities and resources for implementing entrepreneurship education are higher in A-accredited schools than they are in B-accredited schools. The main barriers faced by teachers are low skills in integrating entrepreneurship in learning resources (83,33%) and lack of time (83,33%), and the absence of financial supports from the school (66,66%).

Keywords: entrepreneurship education, school accreditation, entrepreneurship value

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, menetapkan pentingnya peningkatan akses pendidikan yang berkualitas,

terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan di-

arahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan, 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Undang-Undang (UU) No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 dan UU No. 20 Tahun 2003, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, menunjukkan bahwa bahwa pendidikan di setiap satuan atau jenjang, termasuk satuan pendidikan menengah (SMA-SMK) harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Akbar, 2000), ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh *hard skill* dan sisanya 80% oleh *soft skill*.

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal, maka dari itu perlu diperhatikan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai

manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk rnengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan kreatif yang mengidamkan peserta didik menjadi subyek pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan. Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna.

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life skills*) termasuk kecakapan berwirausaha. Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subyek pembelajar mandiri

$$M_i = \frac{1}{2} (\text{skor tertinggi} + \text{skor rerendah})$$

$$S_{di} = \frac{1}{6} (\text{skor teringgi} - \text{skor rendah})$$

yang bertanggungjawab, kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha. Untuk mencapai hal tersebut salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan model pendidikan kewirausahaan yang dikemas sedemikian rupa mampu memenuhi tuntutan tujuan pendididkan nasional. Agar bisa mengembangkan model pendidikan kewirausahaan yang sesuai dengan tuntutan tujuan pendidikan nasional perlu dilakukan penelitian awal yang terkait dengan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan program pendidikan kewirausahaan.

Hal ini sesuai mandat Kemendiknas untuk melakukan pemetaan kondisi sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan kewirausahaan agar terlihat kesiapan pada setiap komponen tersebut. Selanjutnya, setelah pemetaan dilakukan maka akan dapat dilakukan penguatan pada komponen yang belum sinkron dengan pendidikan kewirausahaan, sehingga terumuskan model pendidikan kewirausahaan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan kondisi sekolah dan sesuai dengan rancangan kurikulum 2013 yang mana mata pelajaran kewirausahaan menjadi mata pelajaran wajib di SMA dan SMK. Permasalahan penelitian ini meliputi: 1) Bagaimanakah persepsi guru dan kepala sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan di satuan pendidikan menengah (SMA-SMK) sesuai dengan kurikulum 2006 dilihat dari akreditasi sekolah?; 2) Seberapa besar kesiapan guru dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan dilihat dari pemahaman terhadap pendidikan kewirausahaan yang sesuai dengan kurikulum 2006 dilihat dari akreditasi sekolah?; 3) Seberapa besar kesiapan guru dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan dilihat dari pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran (Silabus & RPP) yang sesuai dengan kurikulum 2006 dilihat dari akreditasi sekolah?; 4) Seberapa besar kesiapan sekolah dilihat dari sarana dan prasarana yang diperlukan dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan yang sesuai dengan kurikulum 2006?; 5) Kendala apakah yang dihadapi sekolah dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2006?; 7) Bagaimanakah persepsi guru dan kepala sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan di

satuan pendidikan menengah (SMA-SMK) sesuai dengan kurikulum 2013 dilihat dari akreditasi sekolah?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik *multistage quota/random sampling*. Hal tersebut dikarenakan mencakup populasi yang banyak dan wilayah yang luas yaitu mencakup DIY. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, angket, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan tabel. Teknis analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui perhitungan *mean* atau rerata.

Untuk melakukan analisis deskriptif dilakukan dengan pengkategorian skor masing-masing. Dari skor tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pengkategorian dilakukan berdasarkan *mean* ideal (M_i) dan standar deviasi ideal (S_{di}) yang diperoleh. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan *mean* ideal (M_i) dan standar deviasi ideal (S_{di}) adalah sebagai berikut.

Menurut pendapat Azwar (2009: 109), untuk menentukan kategori skor komponen-komponen digunakan norma seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Penilaian

No.	Skor	Kategori
1.	$x \geq (M_i + 1.SD_i)$	Tinggi
2.	$(M_i - 1.SD_i) < x < (M_i + 1.SD_i)$	Sedang
3.	$x < (M_i - 1.SD_i)$	Rendah

Sumber: Saifuddin Azwar (2009: 109)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan di SMA-SMK diawali dari persepsi guru dan kepala sekolah SMA-SMK tentang pendidikan kewirausahaan. Apabila guru dan kepala sekolah memiliki persepsi yang tinggi terhadap pendidikan kewirausahaan maka pelaksanaan pendidikan kewirausahaan akan lebih lancar. Selain dilihat dari persepsi guru dan kepala sekolah SMA-SMK keberhasilan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan juga dapat dilihat dari tingkat pemahaman guru tentang pendidikan kewirausahaan itu sendiri karena apabila tingkat pemahaman guru tentang pendidikan kewirausahaan tinggi, maka akan memudahkan guru dalam pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan. Namun, apabila tingkat pemahaman guru tentang pendidikan kewirausahaan rendah, maka guru akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Selain itu dalam pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan juga dapat dilihat dari kesiapan guru maupun sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran, sarana/prasarana yang ada di sekolah yang dapat menunjang kegiatan pendidikan kewirausahaan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di SMA-SMK.

Berdasarkan data pada penelitian tahun pertama diperoleh gambaran tentang pendidikan kewirausahaan sebagai berikut.

Persepsi Guru dan Kepala Sekolah dalam Implementasi Program Pendidikan Kewirausahaan SMA-SMK dilihat dari Akreditasi Sekolah (Kurikulum 2006).

Dalam penelitian tahun pertama ini, persepsi guru dan kepala sekolah terhadap program pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2006 penting untuk diketahui sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya. Data persepsi guru dan kepala sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2006 berdasarkan akreditasi sekolah dapat dilihat pada Tabel 2.

Persepsi guru dan kepala sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMA-SMK berdasarkan akreditasi sekolah (Kurikulum 2006) menunjukkan skor seimbang. Skor yang diperoleh jika dilihat dalam konversi skor termasuk dalam kategori sedang. Sekolah dengan akreditasi A baik dari guru maupun kepala sekolah di SMA maupun di SMK menunjukkan skor yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah di sekolah yang berakreditasi lebih memahami tentang program pendidikan kewirausahaan.

Dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMA dan SMK dapat dilihat dari kesiapan pemahaman yang dimiliki guru mengenai pendidikan kewirausahaan. Untuk mengetahui pemahaman guru terhadap program pendidikan kewirausahaan disusun beberapa pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Data

Tabel 2. Persepsi Guru dan Kepala Sekolah terhadap Implementasi Program Pendidikan

No.	Akreditasi	SMA		SMK	
		Guru	Kepala Sekolah	Guru	Kepala Sekolah
1	A	18,19	18,51	18,63	18,63
2	B	17,85	18,46	18,47	18,56

hasil kesiapan guru SMA dan SMK dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan dilihat dari aspek pemahaman ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kesiapan Pemahaman Guru dalam Implementasi Program Pendidikan Kewirausahaan di SMA-SMK

No.	Akreditasi	SMA	SMK
1	A	5,60	5,59
2	B	5,63	5,58

Kesiapan guru dalam melaksanakan implementasi program pendidikan kewirausahaan jika dilihat dari aspek pemahaman termasuk dalam kategori sedang, baik di SMA maupun SMK. Di SMA dengan akreditasi B memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan SMA yang berakreditasi A dengan selisih skor 0,3. Sementara itu, di SMK akreditasi A lebih tinggi dibandingkan dengan SMK yang berakreditasi B dengan selisih skor 0,1. Ini menunjukkan bahwa baik SMA dan SMK yang berakreditasi A maupun B sudah mulai memahami tentang program pendidikan kewirausahaan namun belum secara menyeluruh.

Setelah mengetahui kesiapan pemahaman guru terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan, selanjutnya dalam rangka implementasi program pendidikan kewirausahaan juga dilihat dari kesiapan guru dalam pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dimaksud disini adalah berupa silabus

dan RPP. Tabel 4 merupakan data kesiapan guru SMA dan SMK dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan jika dilihat dari pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP.

Dalam pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran dilakukan pada silabus dan RPP. Dalam hal ini kesiapan guru SMA-SMK sudah mulai melakukan pengintegrasian namun belum secara keseluruhan. Hal tersebut dibuktikan dengan besarnya skor yang diperoleh yaitu sebesar 13,61 guru SMA akreditasi A sudah melakukan pengintegrasian dalam silabus dan sebesar 18,89 sudah melakukan pengintegrasian dalam RPP. Begitu pula dengan SMK akreditasi A sebesar 15,55 guru sudah melakukan pengintegrasian dalam silabus dan sebesar 19,05 guru sudah melakukan pengintegrasian dalam RPP. Skor tersebut masih tergolong sedang karena belum semua guru melakukan pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran dalam hal ini silabus dan RPP.

Dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMA dan SMK salah satunya juga harus didukung dengan adanya berbagai sarana dan prasarana. Setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini terdapat 8 sarana dan prasarana yang umumnya ada di sekolah-sekolah. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang ada di sekolah maka akan

Tabel 4. Kesiapan Guru SMA dan SMK dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Kewirausahaan

No.	Akreditasi	SMA		SMK	
		Silabus	RPP	Silabus	RPP
1	A	13,61	18,89	15,55	19,05
2	B	13,33	18,33	15,17	18,92

semakin baik terutama untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan. Tabel 5 menggambarkan data mengenai sarana dan prasarana yang ada di SMA dan SMK.

Kesiapan guru SMA dan SMK dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan jika dilihat dari sarana dan prasarana termasuk dalam kategori “sedang”. Ini berarti bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah sudah mampu untuk melaksanakan program pendidikan kewirausahaan. Hal tersebut ditunjukkan dari skor dari masing-masing sekolah, yaitu untuk SMA akreditasi A sebesar 33,33 dan akreditasi B sebesar 22,22. Sedangkan untuk SMK akreditasi A sebesar 54,54 dan akreditasi B sebesar 16,66. Dari belum maksimalnya skor kesiapan sarana dan prasarana ini menunjukkan perlu adanya memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah guna tercapai tujuan pendidikan kewirausahaan.

Kendala yang dihadapi sekolah dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan antara SMA dan SMK berbeda-beda. Dalam penelitian ini terdapat 7 poin kendala yang ada di sekolah-sekolah dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan. Tabel 6 adalah data kendala yang dihadapi SMA dan SMK dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMA dan SMK. Kendala utama yang dihadapi di SMA yaitu kurangnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran (83,33%) dan adanya keterbatasan waktu (83,33%). Sedangkan kendala utama yang dihadapi di SMK yaitu belum adanya dukungan dana dari sekolah (66,66%). Dari besarnya skor kendala-kendala yang dihadapi sekolah

Tabel 5. Sarana dan Prasarana yang ada di SMA dan SMK

No	Sarana dan Prasarana	Akreditasi	SMA		SMK	
			F	%	F	%
1	Perpustakaan	A	9	100	11	100
		B	9	100	6	100
2	Koperasi Siswa	A	9	100	11	100
		B	9	100	6	100
3	Majalah Dinding	A	9	100	11	100
		B	9	100	6	100
4	Lab. Kewirausahaan	A	4	44,44	6	54,54
		B	3	33,33	1	16,66
5	Referensi Buku Kewirausahaan	A	5	55,55	8	72,72
		B	3	33,33	2	33,33
6	Ruang Keterampilan	A	4	44,44	11	100
		B	7	77,77	3	50
7	Slogan kata-kata Motivasi	A	9	100	11	100
		B	7	77,77	6	100
8	Bank Mini	A	3	33,33	6	54,54
		B	2	22,22	1	16,66

Tabel 6. Kendala yang Dihadapi SMA dan SMK dalam Implementasi Program Pendidikan

No.	Kendala	Akredita- tasi	SMA		SMK	
			F	%	F	%
1.	Kurangnya motivasi siswa dalam mempelajari materi kewirausahaan	A	13	72,44	10	45,45
		B	8	44,44	7	58,33
2.	Kurangnya sosialisasi tentang kebijakan implementasi pendidikan kewirausahaan	A	11	61,11	12	54,54
		B	8	44,44	6	50
3.	Kurangnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran	A	11	61,11	10	45,45
		B	15	83,33	5	41,66
4.	Belum adanya dukungan dana dari sekolah	A	9	50	15	68,18
		B	12	66,66	8	66,66
5.	Belum lengkapnya perangkat pembelajaran untuk mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan	A	14	77,77	13	59,09
		B	12	66,66	7	31,81
6.	Keterbatasan waktu	A	15	83,33	11	50
		B	8	44,44	7	31,81
7.	Kurangnya dukungan dari wali murid	A	13	72,44	14	63,63
		B	10	55,55	6	50

dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan bisa diatasi sehingga dapat tercapai tujuan dari program pendidikan kewirausahaan secara utuh.

Setelah diketahui skor persepsi guru dan kepala sekolah dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2006 dan akreditasi sekolah, selanjutnya guru dan kepala sekolah SMA dan SMK juga dimintai persepinya tentang implementasi program pendidikan kewirausahaan namun sesuai dengan kurikulum 2013. Sesuai dengan kebijakan pemerintah sendiri menyatakan bahwa program pendidikan kewirausahaan dimasukkan dalam mata pelajaran yang ada

di sekolah termasuk di sekolah menengah, baik Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tabel 7 menggambarkan data persepsi guru dan kepala sekolah SMA-SMK terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan sesuai dengan Kurikulum 2013.

Persepsi guru dan kepala sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMA-SMK berdasarkan akreditasi sekolah (Kurikulum 2013) menunjukkan skor yang tidak berbeda jauh. Namun, jika dibandingkan dengan skor persepsi guru dan kepala sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewira-

Tabel 7. Persepsi Guru dan Kepala Sekolah SMA”SMK terhadap Implementasi Program Pendidikan Kewirausahaan SMA-SMK

No.	Akre- ditasi	SMA		SMK	
		Guru	Kepala Sekolah	Guru	Kepala Sekolah
1	A	17,89	18,03	18,12	18,23
2	B	17,35	17,64	17,56	17,97

usaha sesuai dengan kurikulum 2006 skor tersebut lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan baik guru dan kepala sekolah SMA-SMK belum begitu memahami tentang kebijakan pemerintah terbaru tersebut.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: a) Persepsi guru dan kepala sekolah SMA dan SMK jika dilihat berdasarkan akreditasi sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2006 termasuk dalam kategori “sedang”. Dengan perolehan skor untuk guru SMA berakreditasi A sebesar 18,19 dan SMA berakreditasi B dengan “skor 17,85. Sedangkan untuk guru SMK berakreditasi A sebesar 18,63 dan SMK berakreditasi B sebesar 18,47. Sementara itu, skor kepala sekolah SMA berakreditasi A sebesar 18,51 dan SMA berakreditasi B dengan skor 18,46. Sedangkan untuk SMK berakreditasi A sebesar 18,63 dan SMK berakreditasi B sebesar 18,56; b) Kesiapan guru dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMA dan SMK dilihat dari pemahaman guru terhadap pendidikan kewirausahaan termasuk dalam kategori “sedang”. Dengan skor 5,60 untuk SMA akreditasi A, 5,63 untuk SMA akreditasi B, 5,59 untuk SMK akreditasi A dan 5,58 untuk SMK akreditasi B; c)

Kesiapan guru dalam rangka implementasi program pendidikan kewirausahaan dilihat dari pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran seperti silabus dan RPP termasuk dalam kategori “sedang” guru SMA dan SMK baik akreditasi A maupun akreditasi B cukup mampu mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam silabus. Ini terbukti dari perolehan skor untuk SMA akreditasi A dan B sebesar 13,61 dan 13,33. Perolehan skor SMK akreditasi A dan B sebesar 15,55 dan 15,17; d) Kesiapan guru SMA dan SMK dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan jika dilihat dari sarana dan prasarana termasuk dalam kategori “sedang” dengan skor untuk SMA akreditasi A sebesar 33,33 dan akreditasi B sebesar 22,22. Sedangkan untuk SMK akreditasi A sebesar 54,54 dan akreditasi B sebesar 16,66; e) Kendala utama yang dihadapi di SMA yaitu kurangnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran (83,33%) dan adanya keterbatasan waktu (83,33%). Sedangkan kendala utama yang dihadapi di SMK yaitu belum adanya dukungan dana dari sekolah (66,66%); f) Persepsi guru dan kepala sekolah SMA dan SMK jika dilihat berdasarkan akreditasi sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan dalam menyongsong kurikulum 2013 termasuk dalam kategori “sedang”. Dengan perolehan skor untuk guru SMA berakreditasi A sebesar 17,89 dan SMA berakreditasi B dengan skor 17,35. Sedangkan untuk guru SMK berakreditasi A sebesar 18,12 dan SMK berakreditasi B sebesar 18,56. Sementara itu, persepsi kepala sekolah SMA berakreditasi A sebesar 18,03 dan SMA berakreditasi B dengan skor 17,64. Sedangkan untuk SMK berakreditasi A sebesar 18,23 dan SMK berakreditasi B sebesar 17,91.

DAFTAR PUS TAKA

Akbar, A.I.. 2000. *Tentang Pendidikan Karakter*. Jakarta: Rajawali.

Azwar, S. 2009. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.